

DAFTAR TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

APIP
TAHUN ANGGARAN

INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2021

IRBAN WILAYAH I

PHP-1

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BIDANG / NOMOR DAN TANGGAL LHP	TEMUAN / PENYEBAB PENYIMPANGAN		SARAN / REKOMENDASI		TINDAK LANJUT / TANGGAPAN	KATEGORI TL			PARAF	KETERANGAN
	URAIAN RINGKASAN	KODE TEMUAN	URAIAN RINGKASAN	KODE SARAN	URAIAN RINGKASAN	S	D	B		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700/208/LHP- R/2021/INSP 26 November 2021	1. Aspek Sarana dan Prasarana Pemecahan Paket Pengadaan Untuk Menghindari Tender. Hal ini disebabkan Pengguna Anggaran yang berwenang dalam menetapkan perencanaan pengadaan, sekaligus sebagai penanggungjawab kegiatan belum secara konsekuen dalam melaksanakan dan menegakkan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.	1.04.04	Kami merekomendasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah agar : a. Menegur secara tertulis Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah atas kelalaiannya dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di Instansi yang dipimpinnya. b. Memerintahkan secara tertulis Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	05 05	STL NO. 700/50/TL/SEKRE-2/INSP TGL. 21 FEBRUARI 2022 STL NO. 700/50/TL/SEKRE-2/INSP TGL. 21 FEBRUARI 2022	5 5			de 4/7-22 de 4/7-22	
	2. Aspek Keuangan 1. Pembelian ATK melebihi Harga Pasar. Hal ini disebabkan : a. Kelalaian PPTK dalam merencanakan anggaran untuk kegiatan Alat Tulis Kantor. b. Lemahnya verifikasi oleh PPTK c. Lemahnya pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung.	1.01.07	Direkomendasikan kepada : a. Gubernur Kalimantan Tengah memberikan teguran tertulis kepada Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran agar meningkatnya pembinaan dan pengawasan terkait belanja yang dikeluarkan di setiap kegiatan. b. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan teguran tertulis kepada PPK dan PPTK atas kelalaian tidak melakukan survey pasar terlebih dahulu dan tidak membuat HPS. c. Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan secara tertulis kepada masing-masing PPTK untuk menyelaraskan kelebihan pembelian ATK tersebut sebesar Rp. 16.935.250,00 dan menyertakan ke Kas Daerah dengan bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.	05 05 01	STL NO. 700/50/TL/SEKRE-2 INSP. TGL. 21 FEBRUARI 2022 Surat teguran No. 700/211-2/ KUK/2022 tgl 21 Maret 2022 STS SEBESAR Rp.16.935.250,- TGL. 14/04/2022 SURAT Plt. Kadishub No : 700/211.1/KUK/2022 TGL: 21 MARET 2022	5 5 5			de 4/7-22 de 4/7-22 de 4/7-22	

Temuan : 9
Rekom : 19

S = 19
D = -
B = -

2021 Selesai 4/7/22

BIDANG / NOMOR DAN TANGGAL LHP	TEMUAN / PENYEBAB PENYIMPANGAN		SARAN / REKOMENDASI		TINDAK LANJUT / TANGGAPAN		KATEGORI TL			PARAF	KETERANGAN
	URAIAN RINGKASAN	KODE TEMUAN	URAIAN RINGKASAN	KODE SARAN	URAIAN RINGKASAN	S	D	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
✓	2. Pemberian Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) belum Tepat Sasaran. (1.01.06) Hal ini disebabkan kelemahan Pengguna Anggaran dalam mengendalikan pendistribusian BBM tidak dibuatnya Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah tentang pemberian BBM bagi kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2.	3.03.05	Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, selaku Pengguna Anggaran agar : a. Menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengaturan/Pengelolaan dan Pemberian untuk Kendaraan Dinas/Operasional. b. Menetapkan penerima kupon BBM pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas dalam satu tahun anggaran sesuai rencana kebutuhan operasional kendaraan dinas di lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. c. Memerintahkan PPTK Sdr. SUPRIYADI, SE NIP.19690318 199303 1 005 supaya lebih cermat dalam mengelola belanja BBM kegiatan pemeliharaan rutin/berkala dinas/operasional disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. d. Memerintahkan secara tertulis PPTK a.n. SUPRIYADI, SE NIP.19690318 199303 1 005 supaya menghentikan pengeluaran BBM yang tidak tepat sasaran	09	SK NO : 802/09/KP/2022 TGL : 12 JANUARI 2022	5				de 4/7-22	}
				09	Daftar Penerima BBM sesuai SK pengguna kendaraan dinas	5			de 4/7-22		
				09	SURAT Ptt. Kadishub No : 700/211.9/KUK/2022 TEL : 21 MARET 2022	5			de 4/7-22		
				09	SURAT Ptt. Kadishub No : 700/211.9/KUK/2022	5			de 4/7-22		
	3. Terdapat kelebihan pembayaran belanja Honorarium PPTK sebesar Rp4.200.000,00. Hal ini disebabkan: a. Lemahnya Pengawasan dari atasan langsung. b. Lemahnya verifikasi dari PPK. c. Kelalaian PPTK dalam menyusun rencana honorarium PPTK tidak sesuai dengan Standar Biaya yang berlaku.	1.01.07	Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran agar : a. Menegur secara tertulis PPK Sdr. Slamet Widodo, SE NIP.19670302 199003 dan PPTK sdr. Supriyadi, SE NIP.19690318 199303 1 005 atas kelalaiannya tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan pembayaran honorarium. b. Memerintahkan secara tertulis PPTK Sdr. Supriyadi, SE NIP.19690318 199303 1 005 supaya mempertanggungjawabkan pengeluaran sebesar Rp4.200.000,00 serta menagih kepada masing-masing pegawai tersebut di atas untuk disetor ke Kas Daerah. Bukti setor disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah up. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.	05	SURAT Ptt. Kadishub No : 700/211.10/KUK/2022 TEL : 21 MARET 2022	5			de 4/7-22	}	
				01	SURAT Ptt. Kadishub No : 700/211.8/KUK/2022 TEL : 21 MARET 2022 STS SEBESAR Rp4.200.000,- TGL. 14/04/2022	5			de 4/7-22		
	4. Terdapat Honorarium sebesar Rp.20.580.000,00 dibayarkan tidak sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan: a. Lemahnya Pengawasan dari atasan langsung.	1.01.07	Direkomendasikan kepada Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran agar : a. Menegur secara tertulis PPK Sdr. Slamet Widodo, SE NIP.19670302 199003 dan PPTK Sdr. Sdr Supriyadi, SE NIP.19690318 199303 1 005 atas kelalaiannya tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam		SURAT Ptt. Kadishub Nomor : 700/211.6/KUK/2022 Tgl : 21 MARET 2022	5			de 4/7-22	}	

BIDANG / NOMOR DAN TANGGAL LHP	TEMUAN / PENYEBAB PENYIMPANGAN		SARAN / REKOMENDASI		TINDAK LANJUT / TANGGAPAN		KATEGORI TL			PARAF	KETERANGAN
	URAIAN RINGKASAN	KODE TEMUAN	URAIAN RINGKASAN	KODE SARAN	URAIAN RINGKASAN	S	D	B			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	b. Lemahnya verifikasi dari PPK. c. Kelalaian PPTK dalam menyusun rencana honorarium PPTK tidak sesuai dengan Standar Biaya yang berlaku.		melaksanakan pembayaran honorarium. b. Memerintahkan secara tertulis PPTK Sdr. Supriyadi, SE NIP.19690318 199303 1 005 supaya menghentikan pembayaran honorarium kepada pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).	05 05	SURAT NO : 700/211.7/KUK/2022 TEL : 21 MARET 2022	5			4/2-22	}	
	5. Susunan Peran Verifikator Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) belum sesuai Ketentuan. Hal ini disebabkan kurang cermatnya pengelola keuangan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam mempedomani aturan yang berlaku.	2.03.05	Direkomendasikan Kepada PIt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah agar pada tahun anggaran berikutnya menetapkan Surat Keputusan Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah tidak dalam bentuk susunan Tim (Ketua, anggota) namun ditunjuk dalam peran sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pembantu PPK).	09	SK NOMOR : 900/13/UK/2022 TGL. 3 JANUARI 2022	5			4/2-22		
	6. Laporan Realisasi Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2021 belum dibuat. Hal ini disebabkan kelemahan Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian dalam menyusun Laporan Realisasi Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2021.	1.01.05	Direkomendasikan kepada PIt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah agar : a. Menegur secara tertulis Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian atas kelemahannya belum menyelesaikan Laporan Realisasi Keuangan Semester I Tahun 2021. b. Memerintahkan secara tertulis Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Kepegawaian supaya segera menyelesaikan Laporan Realisasi Keuangan Semester I Tahun 2021.	05 05	- SURAT NOMOR : 700/211.5/KUK/2022 TEL : 21 MARET 2022 - BERITA ACARA HASIL RENKOTERLAMPIR	5	5		4/2-22 4/2-22	}	
	7. Penyerapan anggaran masih rendah. Hal ini disebabkan tidak disiplinnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan.	3.03.05	Direkomendasikan kepada PIt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah memerintahkan secara tertulis semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk memacu percepatan pelaksanaan kegiatan Belanja Langsung sesuai rencana yang tertuang dalam DPPA Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.	09	SURAT NOMOR : 700/211.4/KUK/2022 TEL : 21 MARET 2022	5			4/2-22		
	8. PPK-SKPD belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan kelalaian PPK-SKPD dalam memverifikasi dokumen SPJ tidak dilengkapi dengan bukti nota verifikasi.	1.01.05	Direkomendasikan kepada PIt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah agar : a. Menegur secara tertulis Sdr. Slamet Widodo, SE NIP.19670302 199003 1 014 selaku PPK atas kelemahan dalam memverifikasi dokumen SPJ tidak dilengkapi dengan bukti nota verifikasi b. Memerintahkan secara tertulis kepada Sdr. Slamet Widodo, SE NIP.19670302 199003 1 014 selaku PPK-SKPD supaya melakukan verifikasi Pertanggungjawaban SPJ dengan melengkapi bukti nota yang sudah di verifikasi	05 08	SURAT NO : 700/211.3/KUK/2022 TEL. 21 MARET 2022 SURAT NO : 700/211.3/KUK/2022 TEL : 21 MARET 2022 Ada Bukti nota yg sudah	5	5		4/2-22 4/2-22	}	